

**EDITORIAL:****Agama dalam Hubungan Internasional (*Religion in International Relations*)**

Tak dapat dipungkiri agama memengaruhi jalannya hubungan internasional, baik disengaja dan direncanakan atau tidak, selama manusia, secara tunggal dan kolektif, menjadi faktor dan aktor utama yang mengendalikannya secara langsung maupun melalui representasinya (materi dan non-materi). Tidak mudah untuk mendefinisikan agama, dan menetapkan fenomena maupun peristiwa dalam politik internasional bersifat “religius” atau tidak, atau apakah agama merupakan bantuan atau hambatan dalam mengejar perdamaian, pembangunan berkelanjutan, dan hak asasi manusia, menurut ide yang sudah ada sebelumnya. Hal ini terutama bila faktor politik terkait kekuasaan dan kepentingan sepihak terdapat dan memotivasi di belakangnya.

Secara luas dan vertikal agama dipahami sebagai sistem keyakinan, nilai-nilai, praktik, dan ritual yang menghubungkan manusia dengan dimensi transenden, seperti Tuhan, dewa-dewi, atau kekuatan ilahi. Agama mencakup berbagai aspek, seperti kepercayaan pada kehidupan setelah kematian, moralitas, hubungan antarumat manusia, dan tujuan keberadaan. Ganjarannya adalah pahala dan kehidupan surgawi di akhirat bila diamalkan (Shuriye, 2011). Secara horizontal, agama dipercaya sebagai anjuran atau pedoman dan pandangan hidup yang bersifat normatif dan positif untuk dijalankan bagi manusia dan hubungan antarmanusia dalam kehidupan bersama yang damai dan tertata lebih baik dan benar di dunia. Yang menjadi rumit dan bermasalah adalah banyak versi agama, terutama yang diinstitusikan, memiliki klaim legitimasi dan kebenaran mutlaknya

dari para penganut. Perdebatan dan pertikaian antarpenganut versi agama, atau yang disebut oleh Huntington (2002) sebagai konflik antarperadaban, kerap bertumpah darah yang mewarnai sejarah kehidupan manusia dan jalannya hubungan internasional. Sampai ditemukan gagasan lain oleh para filsuf Barat, sebagai jalan tengah atau mediasi dengan menanggalkan hal-hal yang bersifat religius, terutama yang bermasalah dari versi agama apapun, yang disebut dengan 'Sekular'. Selanjutnya, sesuai dengan Thomas Kuhn (1962), Sekularisme menjadi 'ilmu normal' setelah berhasil memenangkan perdebatan paradigmatis secara bertahap (abad ke-17- abad ke-19) antara agama dan sekularisme dalam revolusi ilmiah. Kebenaran tidak bersifat absolut dan universal, melainkan bergantung pada paradigma ilmiah yang dominan dalam suatu komunitas ilmiah pada waktu tertentu. Dalam pandangan Kuhn, kebenaran ilmiah adalah hasil dari konsensus sosial yang dibangun di dalam kerangka paradigma. Di antara komunitas pendukung sekularisme adalah para cendekia studi Hubungan Internasional (HI).

Meskipun sekularisme berjaya, namun tidak menyebabkan agama menghilang sepenuhnya. Sebaliknya, agama hanya beradaptasi dengan lingkungan baru, dan merupakan fenomena transhistoris dan transkultural, dapat ditemukan di semua waktu dan tempat (Fox & Sandler, 2004). Faktor agama tidak diterima dalam ilmu sosial Barat, khususnya dalam teori Hubungan Internasional. HI lahir dan berkembang di Eropa di antara dua perang besar (Perang Dunia 1 dan Perang Dunia 2), khususnya pada era ketika sekularisme modern pada abad ke-20 mencapai puncak kejayaannya. Para cendekiawan melihat perkembangan disiplin keilmuan HI sebagai respons terhadap dikesampingkannya agama dalam perkembangan negara-bangsa modern. Kemajuan sosial dan teknologi akan menggantikan peran agama dalam politik dan politik internasional. Keyakinan ini dipegang oleh banyak akademisi HI, mendorong pengabaian dan pengucilan agama dalam analisis mereka, terutama dalam kajian yang didasarkan pada positivisme ilmiah (Hurd, 2009). Beberapa cendekia HI yang menolak agama sebagai fokus kajian sering kali percaya bahwa hubungan internasional lebih dipengaruhi oleh faktor-faktor rasional, material, dan sekuler, seperti kekuasaan negara, ekonomi, dan keamanan. Namun, pandangan ini semakin ditantang oleh realitas kontemporer yang menunjukkan peran signifikan agama dalam politik global (Erin K, 2022).

Banyak peristiwa internasional merupakan katalisator bagi penilaian ulang peran agama dalam hubungan internasional bagi para cendekia HI. Penjelajahan tilas balik

sejarah diperlukan untuk menggugah curiositas cendekia terhadap fenomena agama yang melekat erat dalam setiap fokus kajian hubungan internasional (keamanan, kekuasaan, ekonomi) yang selama ini diteliti dan digeluti.

Sebagai awal, agama memiliki peran yang signifikan dalam hubungan antarbangsa. Pada masa pra-modernisasi (abad kuno hingga abad pertengahan/abad ke-15), agama-agama menjadi fondasi utama dalam hubungan antarnegara dan masyarakat. Hubungan antaraktor internasional kerap digerakkan oleh alasan religius. Agama menjadi salah satu sumber legitimasi kekuasaan atau politik dan hukum, serta menjadi landasan untuk membangun aliansi, menjustifikasi perang, dan membentuk identitas kolektif di antara berbagai kelompok (Fox J. , 2001). Sebagai contoh, Konflik antaragama seperti Perang Salib (abad ke-11 hingga ke-13) menjadi simbol persaingan geopolitik dan ideologis, mencerminkan bagaimana agama menjadi motivasi dan alasan utama bagi perang besar yang melibatkan banyak wilayah dan aktor politik (Davies, 1996). Kekaisaran Romawi Suci dan Bizantium menggunakan Kekristenan sebagai instrumen integrasi dan kontrol di wilayah mereka. Penyebaran Islam melalui perdagangan, diplomasi, dan penaklukan (misalnya, Kekhalifahan Abbasiyah) yang sering berfungsi sebagai motivasi ekspansi (Huntington, 2002). Institusi keagamaan transnasional, seperti Gereja Katolik Roma, berperan sebagai aktor non-negara dengan pengaruh besar dalam menentukan hubungan antarnegara. Pada periode ini, bahkan para penguasa atau pemimpin melihat diri mereka sebagai wakil Tuhan (Huntington, 2002); (Esposito, Fasching, & Lewis, *World's Religion Today*, 2017).

Institusi keagamaan transnasional, seperti Gereja Katolik Roma misalnya, memainkan peran penting sebagai aktor non-negara dalam hubungan internasional. Struktur dasar Gereja Katolik memiliki keterlibatan transnasional yang sudah berlangsung lama. Dengan otoritas terpusat di Vatikan dan organisasi hierarkis yang menjangkau dunia, Gereja beroperasi melampaui batas-batas nasional. Posisi unik ini memungkinkannya untuk mempengaruhi tidak hanya praktik keagamaan tetapi juga dinamika politik dan sosial di berbagai negara. Keterkaitan agama dan politik ini telah membentuk kenegaraan sepanjang sejarah, dengan Gereja bertindak sebagai kompas moral bagi penguasa dan bangsa (Ryall, 2001) (Valuer, 1971). Pengaruh Gereja Katolik mampu untuk memobilisasi sumber daya, membentuk opini publik, dan mengadvokasi keadilan sosial. Sebagai salah satu aktor transnasional tertua dan terbesar, Gereja Katolik

memiliki sekitar 1,2 miliar pengikut di seluruh dunia. Besarnya jumlah pengikut ini, memberikan Gereja Katolik otoritas moral dan *softpower* yang substansial (Kristiono, 2017) (Haynes J. , Religion, Nationalism, and Transnational Actors, 2021). Gereja Katolik memainkan peran penting dalam membentuk hubungan internasional melalui berbagai mekanisme (Haynes J. , Religion in Foreign Policy, 2017) (Shani, 2009): i) *Otoritas Moral*: Ajaran-ajaran Gereja menyediakan kerangka moral yang dapat memengaruhi kebijakan negara dan norma-norma internasional. Misalnya, Konsili Vatikan II mendorong Gereja untuk terlibat lebih aktif dalam isu-isu hak asasi manusia, memosisikannya sebagai otoritas moral dalam urusan global; ii) *Pengaruh Budaya*: Jaringan Gereja yang luas memungkinkannya untuk mempromosikan nilai-nilai budaya yang dapat melampaui kepentingan nasional, menumbuhkan rasa komunitas global. Diplomasi budaya ini dapat mengarah pada hubungan yang lebih kuat antara negara-negara yang memiliki nilai yang sama, bahkan jika mereka berbeda secara politik; dan iii) *Keterlibatan Diplomatik*: Upaya diplomatik Vatikan sering berfokus pada resolusi konflik dan masalah kemanusiaan. Dengan menengahi perselisihan internasional dan mengadvokasi perdamaian, Gereja meningkatkan perannya sebagai fasilitator dialog di antara bangsa-bangsa.

Pada abad modern awal (abad ke-16 hingga ke-18), dominasi Gereja, terutama Gereja Katolik dan kekuasaan Kekaisaran Romawi Suci, mengalami pergeseran besar dalam sejarah agama, politik, dan budaya Eropa. Penyebabnya adalah, antara lain, terjadinya revolusi ilmiah yang memperkenalkan metode saintifik berbasis pada rasionalitas, sehingga memperlemah pandangan dunia berbasis agama. Pada saat yang sama terjadi gerakan Reformasi Protestan yang dipimpin oleh Martin Luther pada tahun 1517. Reformasi dipicu oleh banyaknya ditemukan praktik-praktik Gereja yang menyimpang dari ajaran Kristen sejati, seperti indulgensi, korupsi, nepotisme, dan persaingan kekuasaan. Reformasi menantang legitimasi doktrin Katolik dan kekuasaan paus, menciptakan ketegangan antara negara-negara yang berpegang pada Katolik (seperti Spanyol, Austria, dan Italia) dan negara-negara yang mendukung Protestanisme (seperti Jerman bagian utara, Skandinavia, dan Inggris). Pada puncaknya, ketegangan ini menjadi penyebab konflik lebih lanjut, termasuk Perang Tiga Puluh Tahun (1618–1648). Reformasi yang berujung peperangan, tidak hanya mengubah wajah Kekristenan tetapi juga memengaruhi perkembangan masyarakat modern, termasuk ide-ide kebebasan

individu dan tanggung jawab pribadi. Perang berakhir dengan Perjanjian Westfalen atau Westphalia (1648) yang mengukuhkan pluralisme agama di Eropa dan menetapkan prinsip *cuius regio, eius religio* (penguasa menentukan agama wilayahnya). Perjanjian ini dianggap sebagai titik balik yang penting karena membentuk dasar sistem negara-bangsa modern dan memperkenalkan konsep kedaulatan negara dan membatasi peran agama dalam urusan domestik dan antarnegara (Philpott, 2000).

Pada abad ke-17 dan ke-18, munculnya kaum borjuis, industrialisasi, Pencerahan (*Enlightenment*), dan Revolusi Prancis, serta agama, didorong ke dalam politik dalam negeri dan mulai berpindah dari kerajaan dan keluarga kekaisaran ke rakyat. Secara kronologis dan konseptual, Pencerahan memberikan visi dan Revolusi Prancis yang mewujudkannya. Pencerahan adalah gerakan bertahap para intelektual dan budaya (filsuf) Eropa, terutama Perancis, yang tidak secara langsung terlibat dalam aksi politik revolusioner, dalam memberikan ide dan pemikiran mengenai pembentukan tatanan politik dan sosial modern baru. Pencerahan menawarkan kerangka teoretis tentang kebebasan (*liberté*), kesetaraan (*égalité*) dan persaudaraan (*fraternité*) serta pemerintahan demokratis (Campbell, 2006). Terkait ide ini dengan kontra agama, Pencerahan melahirkan prinsip sekularisme (*laïcité*) atau pertimbangan naturalistik. Para filsuf Pencerahan, seperti Voltaire, Jean-Jacques Rousseau, Immanuel Kant, dan David Hume, menekankan pentingnya rasionalitas, kebebasan berpikir, dan toleransi beragama. Voltaire secara khusus mengkritik dogma gereja dan intoleransi agama, mendukung gagasan bahwa agama harus menjadi urusan pribadi, bukan negara. Rousseau mengusulkan agama sipil (*civil religion*) dengan negara mengakui nilai moral agama tetapi tidak mendukung satu agama tertentu. Sekularisme Pencerahan ini kemudian mempunyai pengaruh yang besar dalam peradaban Barat dan menjalar ke peradaban-peradaban lainnya di dunia (Davies, 1996).

Dalam istilah politik, sekularisme yang dimaksud adalah prinsip yang memisahkan negara atau institusi pemerintahan dari pengaruh agama atau otoritas keagamaan (Taylor, 2007). Dalam sistem sekular, negara tidak mengatur atau mendikte praktik agama, dan otoritas agama tidak mengontrol pemerintahan. Negara mengurangi atau tidak mendasarkan kebijakan publiknya pada doktrin agama. Melainkan kebijakan disusun berdasarkan pada prinsip rasional dan logika ilmu pengetahuan, kepentingan bersama serta nilai-nilai universal dengan etika kosmopolitanisme. Negara menjamin dan

melindungi hak kebebasan beragama dan tidak beragama setiap individu. Prinsip sekularisme ini bertujuan untuk menjaga netralitas, menciptakan masyarakat yang inklusif, bebas dari diskriminasi agama tertentu, mendorong toleransi dan kerukunan antaragama, serta melindungi hak-hak individu dalam masyarakat yang pluralistik untuk tegaknya suatu tatanan nasional dan internasional yang egaliter dan demokratis (Taylor, 2007). Meskipun demikian, beberapa pihak berargumen bahwa sekularisme mengabaikan peran positif agama dalam kehidupan sosial dan politik. Bahkan pada titik yang ekstrim, perbedaan interpretasi dan implikasinya terhadap kehidupan beragama di suatu wilayah, sekularisme dianggap represif terhadap ekspresi agama (Bhargava, 1998).

Sekularisme juga mencakup pemisahan agama dari ilmu pengetahuan. Sekularisme garis keras menolak penjelasan berbasis agama dan supranatural atau metafisika yang secara epistemologis tidak mempunyai keabsahan, karena kebenaran mutlaknya mustahil untuk dicapai. Sementara sekularisme garis lunak, menekankan pada posisi netralitas, toleransi, dan liberalisme menjadi prinsip dan nilai-nilai utama dalam diskusi sains dan agama. Keabsahannya diperoleh melalui metode ilmiah berbasis rasionalitas, empirisme, dan objektivitas, sehingga agama dianggap berada di luar ruang lingkup ilmu modern. Oleh kekuatan Ilmu pengetahuan agama ditempatkan sebagai domain kepercayaan pribadi yang dihormati, sementara sains menjadi alat untuk memahami dunia nyata (Taylor, 2007).

Sekularisme paling baik dipahami sebagai ideologi, paradigma, pandangan dunia, dan strategi atau semuanya menjadi suatu perdebatan. Namun para cendekia sepakat bahwa makna sekularisme jamak, kehadirannya tergantung pada konteks historis, politik, dan budaya setempat di mana sekularisme itu diterapkan. Setiap negara dapat mempunyai pendekatan kebijakan uniknya sendiri terhadap agama dan politik. Menurut sekularisme pasif, dalam parameter tertentu, agama dapat memberikan pengaruh positif dalam kehidupan publik, dan berkontribusi pada kebaikan bersama (Bhargava, 1998). Contohnya, negara-negara Eropa dan Amerika Utara masih mengizinkan atau mendorong ekspresi agama di depan umum dan keterlibatan organisasi keagamaan dalam penyediaan kesejahteraan dan layanan publik hingga kampanye politik. Meskipun demikian, kerap terdapat hierarki antara agama yang berbeda. Agama Kristen sering dianggap sebagai kehadiran positif dan didorong dalam kehidupan publik sebagai bagian dari nilai-nilai demokrasi liberal dan warisan budaya wilayah-wilayah ini (Beyer & Beaman, 2007). Di

Indonesia, agama Islam paling diistimewakan di antara agama-agama yang lain, meski ideologi Pancasila menjamin kesetaraan dan toleransi antaragama. Lain halnya menurut sekularisme asertif, negara secara aktif mengawasi batas-batas ruang publik untuk mengecualikan agama; dan agama berpotensi berbahaya, mengganggu, tidak rasional, dan menjadi sumber kekerasan, perpecahan, serta kekacauan jika diizinkan di ruang publik. Akibatnya, semua elemen agama, termasuk ekspresi dan representasinya harus dikecualikan dari politik dan kehidupan publik. Contohnya, sejak awal tahun 2000-an, beberapa negara Eropa, termasuk Prancis dan Belgia mengeluarkan undang-undang yang melarang penggunaan simbol-simbol agama di depan umum. Kedua jenis sekularisme ini tidak hanya berpengaruh pada tingkat politik negara dalam negeri, tetapi juga pada tingkat hubungan antarnegara.

Sekularisme Pencerahan diperkenalkan dan dicoba diimplementasikan dalam Revolusi Prancis. Revolusi Perancis adalah sebuah gelombang besar perubahan politis, sosial, dan ekonomi berdasarkan ide-ide Pencerahan dengan cara yang lebih bersifat praktis, radikal dan penuh kekerasan di Perancis dan berdampak terutama di Eropa Barat (Campbell, 2006). Selama Pencerahan, para pemikir seperti Voltaire, Diderot, dan Rousseau memperjuangkan akal budi daripada tradisi dan menekankan pentingnya otonomi individu. Mereka mengkritik otoritas Gereja dan mengadvokasi masyarakat di mana pemerintahan didasarkan pada prinsip-prinsip rasional daripada dogma agama. Pergeseran ini dirangkum dalam moto Pencerahan "*Sapere aude*" (*Dare to think for yourself*), yang mendorong individu untuk mempertanyakan norma dan keyakinan yang sudah mapan (Brucy, 2018). Gagasan-gagasan utama Pencerahan yang memengaruhi Revolusi telah menginspirasi lahirnya Deklarasi Hak Asasi Manusia dan Warga Negara (1789); menjadi dasar tuntutan penghapusan monarki absolut di Prancis; sebagai model penerapan Trias Politica selama Revolusi untuk mencegah tirani pemerintahan; mendorong aksi de-Kristenisasi dan pemisahan Gereja dari negara. Toleransi dan egalitarianisme umat manusia diterapkan secara radikal selama revolusi untuk melawan ketidakadilan sosial yang diciptakan oleh sistem *Ancien Régime*. Prinsip sekularisme diterapkan dengan negara tidak lagi mendasarkan kebijakan pada doktrin agama, melainkan pada prinsip rasional dan hukum sipil (Kley, 2006).

Pencerahan dan Revolusi ini tidak hanya mengubah Prancis dan Eropa Barat, tetapi juga menjadi katalis bagi perubahan politik, sosial, dan budaya di seluruh dunia. Revolusi

ini menciptakan paradigma baru tentang peran agama dalam negara dan hubungan antarnegara. Banyak negara kemudian mengadopsi sekularisasi dengan mengurangi atau meniadakan peran agama dalam kehidupan publik, termasuk di Afrika, Asia, Amerika Utara dan Amerika Latin, serta Eropa. Gereja-gereja dan organisasi-organisasi agama lain, meskipun awalnya menentang, akhirnya mulai mencoba menyesuaikan diri dengan gagasan dan nilai-nilai modern yang lahir dari Pencerahan, seperti dialog antaragama dan hak asasi manusia.

Sebagai antitesis Pencerahan, muncul Gerakan Romantisme pada akhir abad ke-18 dan mencapai puncaknya pada abad ke-19 di Eropa. Gerakan ini lahir sebagai reaksi terhadap gagasan universalitas rasional dan Pencerahan, dengan menghidupkan kembali posisi subjektivitas, nilai-nilai emosional, estetika, spiritual, dan kearifan lokal dalam memahami dunia dan memperkuat posisi agama dalam masyarakat. Pada saat yang sama, kolonialisme Eropa mencapai puncaknya pada abad ke-19 dengan agama tetap sebagai alat pendukung yang tak terpisahkan. Gereja berkolaborasi erat dengan kekuatan kolonial untuk "mencivilisasikan" masyarakat di Afrika, Asia, dan Amerika Latin. Namun, misi ini juga menciptakan resistensi negara-negara jajahan yang juga berbasis agama sebagai alat perjuangan, seperti gerakan Hinduisme di India dan Islam di Afrika. Gerakan-gerakan ini menunjukkan bahwa sekularisme tidak pernah sepenuhnya menggantikan agama. Gerakan Romantisme memandang dunia sebagai organisme hidup yang dijiwai dengan roh, bukan mesin yang hanya diatur oleh hukum fisik. Selain itu, alih-alih menolak agama secara langsung, para pemikir Gerakan Romantisme sering memisahkan agama dari praktik gereja dogmatis. Mereka berusaha untuk mengeksplorasi spiritualitas dalam istilah yang lebih luas, misalnya menyelaraskan spiritualitas dengan cita-cita sosial progresif seperti demokrasi dan pengelolaan lingkungan. Pendekatan ini menggambarkan hubungan yang bernuansa antara Romantisme dan agama; daripada mengurangi iman. Misalnya, tokoh-tokoh seperti William Wordsworth dan Samuel Taylor Coleridge menanamkan nilai dalam karya mereka dengan citra dan tema religius yang mencerminkan penghormatan mereka terhadap alam sebagai manifestasi dari ilahi. Demikian pula, filsuf Jerman Friedrich Schleiermacher menekankan aspek pribadi dan emosional dari pengalaman religius. Schleiermacher berpendapat bahwa agama berakar pada rasa ketergantungan yang mendalam pada yang tak terbatas, sebuah sentimen yang dapat hidup berdampingan dengan rasionalisme Pencerahan tetapi melampaui batas-

batasnya (Berlin, Hardy, & Gray, 2013) (Schleiermacher, 1996) (Wordsworth, 2000) (Engell, 1981) (Abrams, 1971) (Cladis, 2015).

Selama Perang Dunia I, Perang Dunia II, dan Perang Dingin pada abad ke-20, antara agama dan sekularisme menunjukkan hubungan yang kompleks dan menciptakan dinamika baru dalam interaksi keduanya. Periode ini sering dikaitkan dengan pengaruh sekularisasi yang meningkat. Modernisasi, industrialisasi, dan kemajuan sains yang berlangsung telah mengurangi peran agama dalam kehidupan publik. Negara-negara yang terlibat perang besar menggunakan retorika nasionalisme lebih daripada agama untuk memobilisasi dukungan rakyat. Akan tetapi, agama tetap menjadi alat penting bagi mereka untuk memberikan dukungan moral kepada rakyat. Seperti, Gereja di Eropa, baik Katolik maupun Protestan, sering mendukung perang sebagai "perjuangan suci," dan menciptakan narasi religius untuk memotivasi tentara dan rakyat (Bhargava, 1998).

Perang Dunia II didominasi oleh ideologi sekular yang ekstrem, seperti Nazisme dan Komunisme yang seringkali bersikap anti-agama. Adolf Hitler memanipulasi agama sebagai alat politik, tetapi juga mengendalikan dan menekan Gereja yang menentang rezim Nazi. Di Uni Soviet, Stalin menekan agama sebagai bagian dari kebijakan ateisme negara, meskipun ia kemudian mengendurkan kebijakan ini untuk mendapatkan dukungan Gereja Ortodoks selama perang. Sebaliknya, di banyak negara, agama menjadi sumber kekuatan moral dan simbol perlawanan terhadap rezim totaliter, seperti yang terjadi di Polandia dan Perancis untuk melawan Nazi (Bergen, 2009).

Selama Perang Dingin (1947–1991), negara-negara Barat, seperti Amerika Serikat dan sekutu NATO, tetap memelihara nilai-nilai sekular dalam pemerintahan, tetapi agama memainkan peran penting dalam membangun identitas ideologis melawan komunisme. Amerika Serikat menggunakan retorika agama untuk membedakan dirinya dari Uni Soviet, yang mengadopsi ateisme negara. Di bawah rezim Uni Soviet, sekularisme diberlakukan secara ekstrem melalui ateisme negara. Namun, represi terhadap agama memicu reaksi balik di banyak wilayah, seperti Polandia, Hungaria dan Ceko Slowakia dengan Gereja Katolik menjadi pusat perlawanan. Fenomena ini mengembalikan agama ke panggung internasional sebagai elemen politik.

Meskipun sekularisme dominan dalam ideologi negara-negara besar yang berperang, di penghujung abad ke-20 tersaksikan kebangkitan agama Islam sebagai respons terhadap sekularitas, globalisasi dan modernitas yang didukung oleh kekuatan

Barat. Globalisasi yang dipimpin oleh kekuatan Barat membawa nilai-nilai liberal, materialisme, dan konsumerisme dianggap mengancam tradisi dan identitas Islam dan bertentangan dengan nilai-nilai lokal. Kegagalan rezim sekular di dunia Muslim untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dan sosial masyarakat mendorong pencarian solusi melalui Islam. Gerakan Islam sering menawarkan sistem alternatif yang berlandaskan keadilan sosial, solidaritas, dan nilai-nilai moral (Kepel, 2002). Manifestasi kebangkitan gerakan Islam yang paling monumental di abad ini adalah Revolusi Islam Iran (1979). Ayatollah Ruhollah Khomeini memimpin revolusi untuk menggulingkan Shah Mohammad Reza Pahlavi yang menjalankan kebijakan sekularisasi dan modernisasi Iran. Selanjutnya Khomeini membangun Republik Islam berdasarkan syariah sebagai dasar hukum negara di Iran. Revolusi ini menginspirasi gerakan Islamis di negara-negara lain seperti Pakistan, Sudan, dan Timur Tengah, Asia, termasuk Indonesia pada pasca Reformasi 1987 (Esposito, 1990).

Perlawanan Islam juga terjadi terhadap invasi Soviet di Afghanistan (1979–1989) ke Afghanistan yang memicu jihad global. Ribuan Muslim dari berbagai negara (termasuk Arab Saudi dan Pakistan) bergabung melawan komunisme yang dianggap anti-agama. Perang ini melahirkan kelompok-kelompok seperti Al-Qaeda yang memanfaatkan sentimen Islam untuk perlawanan transnasional (Roy, 2004); (Huntington, 2002);

Peristiwa-peristiwa kebangkitan Islam ini menunjukkan peran agama yang terus relevan dalam dinamika politik dan sosial global, melampaui batas-batas geografis dan budaya. Kebangkitan agama Islam di pengujung abad ke-20 adalah respons terhadap dominasi sekularisme, modernitas, dan globalisasi Barat. Islam berperan sebagai alat resistensi politik, identitas budaya, dan alternatif moral di dunia yang semakin global. Fenomena ini memperlihatkan bahwa agama tetap relevan dalam dinamika global, bahkan di era modern yang didominasi oleh nilai-nilai sekular. Namun, seperti yang dikemukakan S. N. Eisenstadt, kebangkitan agama secara global bukan sekadar kembali ke bentuk-bentuk agama tradisional yang melihat ke belakang, tetapi melibatkan restrukturisasi agama yang melihat ke depan mengingat pengakuan akan "beragam modernitas" dalam dunia pascamodern. Ini berarti bahwa yang terjadi adalah masyarakat internasional yang benar-benar multikultural sedang dibentuk untuk pertama kalinya. Oleh karena itu, menganggap serius pluralisme budaya dan agama akan menjadi bagian penting dari politik internasional abad ke-21 (Thomas, 2005).

Di pembukaan abad milenium atau ke-21, serangan 11 September 2001 (9/11) memiliki dampak mendalam terhadap agama dalam konteks hubungan internasional, dengan implikasi signifikan terhadap persepsi, kebijakan, dan dinamika global yang melibatkan agama, terutama Islam. Dalam narasi Barat, serangan tersebut sering kali dilihat sebagai tindakan ekstremisme agama yang melibatkan kelompok seperti Al-Qaeda yang mengklaim pembela Islam melawan hegemoni Barat. Hubungan antara ekstremisme agama dan terorisme menjadi fokus utama dalam kebijakan internasional, terutama dalam narasi "*War on Terror*" yang diinisiasi oleh AS. Narasi ini sering disalahgunakan untuk stereotipisasi agama Islam, yang kemudian memicu Islamofobia secara global. Invasi AS ke Afghanistan (2001) dan Irak (2003) dijustifikasi sebagai upaya memberantas terorisme dan ekstremisme Islam (Cesari, 2011). Namun, hal ini sering dianggap sebagai bentuk hegemoni politik yang menysar negara-negara Muslim (Huntington, 2002); (Roy, 2004). Serangan 9/11 juga mendorong munculnya inisiatif berbasis agama untuk perdamaian dan resolusi konflik. Program-program seperti *Interfaith Dialogue* meningkat untuk mengurangi ketegangan antara masyarakat Muslim dan non-Muslim. Selain itu, munculnya diskusi-diskusi internal dalam komunitas Muslim untuk melawan ekstremisme sambil memperjuangkan Islam sebagai agama damai (Herrmann, 2021).

Perkembangan globalisasi abad ke-21 hingga masa kini (tahun 20000-an), ditandai dengan integrasi ekonomi, teknologi, dan budaya lintas negara, memiliki sejumlah ciri yang paradoks. Di satu sisi memperkuat sekularisasi, tetapi di sisi lain mendukung kebangkitan agama. Beberapa ciri globalisasi yang mendukung kebangkitan agama dan menyulitkan dominasi sekularisme sepenuhnya adalah kehadiran interkonektivitas global melalui kemajuan teknologi komunikasi seperti internet dan media sosial. Kehadirannya memungkinkan penyebaran ide-ide religius secara cepat dan global. Dampaknya adalah umat beragama di berbagai belahan dunia dapat terhubung, memperkuat solidaritas transnasional berdasarkan kepercayaan bersama, seperti solidaritas muslim terhadap konflik Palestina atau gerakan dakwah global seperti Tablighi Jamaat (Roy, 2004).

Konflik yang sedang berlangsung antara Rusia dan Ukraina sejak 2022 hingga kini, memiliki dimensi keagamaan yang signifikan, khususnya yang melibatkan Gereja Ortodoks. Agama memainkan peran kunci dalam narasi ideologis dan budaya yang digunakan oleh kedua belah pihak. Perang telah menggarisbawahi penggunaan agama sebagai alat *statecraft* dan identitas nasional. Rusia telah memanfaatkan Gereja Ortodoks

Rusia (ROC) sebagai bagian dari upaya *soft power* dan propagandanya, sementara dorongan Ukraina untuk kemerdekaan spiritual mencerminkan perjuangannya yang lebih luas melawan dominasi Rusia. Dimensi agama dari konflik tersebut menyoroti betapa eratnyanya jalinan iman, politik, dan kedaulatan nasional dalam hubungan internasional kontemporer (O'Beara, 2022).

Demikian pula halnya dengan konflik militer dan politik Israel–Palestina yang mengalami eskalasi sejak tahun 2023. Meskipun faktor politik, sejarah, dan ekonomi juga menjadi penyebab utama, namun perdebatan seputar akses, pengelolaan, dan kontrol atas situs-situs yang memiliki nilai religius yang tinggi bagi tiga agama besar (Yahudi, Islam dan Kristen) di Yarusalem sering kali memicu ketegangan tambahan. Sentimen agama diperkuat untuk memperkuat klaim identitas nasional mereka dan menggalang dukungan internasional. Israel sering menghubungkan eksistensinya dengan narasi Yahudi historis dan teologi, seperti "Tanah yang Dijanjikan." Palestina mengintegrasikan Islam dalam retorika perlawanan mereka terhadap pendudukan Israel. Agama dalam konflik Israel-Palestina bukan penyebab utama, tetapi memperkuat polarisasi dan mempersulit upaya resolusi dan perdamaian. Dinamika agama ini terus menjadi alat politik dan simbol identitas dalam pertikaian tersebut (Kosal, 2024).

Sejarah dunia yang panjang telah menunjukkan dan membuktikan bahwa agama telah menjadi faktor penting bagi setiap pelaku dalam hubungan internasional. Kehadirannya dipermukaan maupun tersembunyi dalam ragam bentuk dan wujud memiliki pengaruh dan dampak yang signifikan terhadap hubungan internasional di setiap zaman. Pengabaian terhadap faktor agama dalam hubungan internasional dalam studi HI dapat dipersepsi sebagai bidang yang tertutup dan tidak sensitif terhadap permasalahan dunia yang sebenarnya ada dan berlangsung di depan mata. Pengkajian yang tidak mendalam dan kritis justru menghambat pengembangan HI sebagai disiplin sesuai dengan norma pembentukan dan peruntukannya. Sejatinya sebagai sebuah disiplin keilmuan, studi HI dapat berkontribusi bagi pemecahan permasalahan internasional, memberi rekomendasi kebijakan dan bagi pengayaan keilmuannya sendiri (Toft, Philpott, & Shah, 2011).

Studi Hubungan Internasional sebagai disiplin keilmuan, seperti yang dikemukakan Kubalkova dkk. (1998), sejak awal adalah disiplin ilmu yang cenderung sekular. Secara epitemologis, disiplin HI tradisional didasarkan pada metode saintifik-positivisme yang

cenderung memprioritaskan faktor-faktor "rasional", objektivitas dan validitas empiris dengan subjek dan isu-isu yang dianggap mungkin (*feasible* dan *reliable*). Agama dianggap tidak dapat diukur atau diramalkan, dan berada di luar jangkauan logika manusia, sehingga sulit dimasukkan ke dalam model analisis ilmiah. Agama yang seringkali tidak melekat pada negara tertentu, melainkan transnasional, dianggap bukan sebagai variabel penting, melainkan sebagai faktor perifer belaka yang tidak langsung memengaruhi hubungan antarnegara. Terkait dengan skop dan unit analisis, agama merupakan masalah domestik bagi negara dan masalah pribadi bagi warga negara sehingga tidak dapat ditampilkan dalam analisis hubungan internasional. Apakah agama sebagai variabel dapat diintegrasikan (atau telah diintegrasikan) ke dalam pemikiran HI arus utama, masih menjadi pertanyaan. Bagaimana kemampuan pemikiran HI dari aliran lainnya memasukkan agama dalam analisisnya?

Paradigma arus utama HI, yaitu Realisme yang berkembang dalam konteks Perang Dingin memusatkan fokusnya pada persaingan kekuatan dan stabilitas sistem internasional. Negara sebagai aktor utama mengejar kepentingan primasi material dan keamanan nasional melalui peningkatan kekuatan militer, ekonomi, dan teknologi. Agama sebagai faktor yang tidak atau kurang nyata, seperti halnya gender, ras, kelas, budaya, dan bahasa, tidak dipandang sebagai variabel yang relevan dan berguna untuk diperhatikan dalam mendukung kepentingan negara itu (Gaddis, 1992). Akan tetapi Realisme dalam HI dapat memulai memasukkan agama dalam hirauan kajian tanpa mengurangi keunikannya. Agama memang bersifat non-material, namun Realisme dapat menambah agama dalam asumsinya sebagai alat untuk mencapai tujuan geopolitik (Troy, 2011). Agama mungkin tidak memiliki peran intrinsik dalam hubungan internasional, tetapi bisa dimanfaatkan oleh negara sebagai *soft power* untuk memperkuat kekuasaan dan memenangkan legitimasi dari aliansi mitra maupun lawan atau pesaing (Nye, 2021); (Kadri & Abdelsalam, 2020)

Meskipun Liberalisme HI lebih menekankan pada rasionalitas, kerja sama internasional, dan institusi global, agama tetap memiliki relevansi dalam analisis, terutama dalam kaitannya dengan norma, hak asasi manusia, kebebasan individu dan peran masyarakat sipil yang harus dihormati. Meskipun Liberalisme cenderung menekankan pendekatan sekular, namun ia tidak mengabaikan agama sepenuhnya. Liberalisme cenderung memandang agama sebagai salah satu cara untuk menciptakan

norma perdamaian global jika agama digunakan sebagai sarana rekonsiliasi (Keohane & Nye, 1977); (Haynes J. , 2008).

Marxisme dalam HI melihat agama sebagai fenomena yang berakar pada struktur material dan dinamika kekuasaan kelas. Bagi Marxisme agama sebagai "candu rakyat" yang mencerminkan fungsinya untuk mengaburkan kesadaran kelas dan mempertahankan status quo. Meskipun sering digunakan untuk mempertahankan status quo kapitalis, agama juga dapat menjadi alat resistensi dalam konteks tertentu. Analisis Marxis memberikan perspektif kritis terhadap bagaimana agama berfungsi dalam sistem global, menghubungkannya dengan kekuasaan ekonomi dan politik (Haynes J. , 2008).

Teori kritis HI berpendapat bahwa sekularisme bukanlah netral, tetapi konstruksi sosial-politik yang mencerminkan dominasi kekuasaan tertentu, terutama di dunia Barat (Cox, 1981). Teori ini menantang struktur kekuasaan global yang dianggap tidak adil, dan agama sering dipahami sebagai kekuatan emansipatoris (Hurd, 2009). Agama tidak dipandang hanya sebagai entitas moral atau spiritual, tetapi sebagai konstruksi sosial yang dipengaruhi oleh kekuasaan, dominasi, dan resistensi. Agama dapat menjadi alat penindasan, tetapi juga dapat menjadi sumber perlawanan terhadap ketidakadilan global. Dengan mengeksplorasi hubungan agama dengan kapitalisme, kolonialisme, dan sekularisme, teori kritis menawarkan cara yang kompleks untuk memahami peran agama dalam tatanan dunia yang tidak setara (Hurd, 2009). Nilai-nilai agama dapat menjadi alat untuk melawan imperialisme dan penindasan ekonomi dan sosial, misalnya dalam gerakan dekolonisasi di Asia, Afrika dan Amerika Latin (Haynes J. , *Religion and Politics in Europe, the Middle East and North Africa* , 2009).

Konstruktivisme HI yang berfokus pada identitas, norma, dan ideologi, memungkinkan analisis tentang peran agama dalam membentuk perilaku para aktor internasional. Dalam kerangka ini, agama dipahami sebagai elemen yang membentuk identitas kolektif dan norma internasional. Agama dapat memengaruhi kebijakan internasional dengan membentuk persepsi tentang kebenaran moral (Thomas, *The Global Resurgence of Religion and the Transformation of International Relations: The Struggle for the Soul of the Twenty-first Century*, 2005).

Pasca-kolonialisme HI menunjukkan bagaimana agama dan budaya Timur direpresentasikan sebagai inferior oleh kekuatan kolonial (Said, 1978). Dalam era kolonial, agama sering digunakan untuk melegitimasi kekuasaan kolonial, dan agama

kerap menjadi sumber kekuatan untuk merebut kembali identitas budaya yang terhapus oleh kolonialisme setelah kemerdekaan (Fanon, 1961). Postkolonialisme mengkritik sekularisme sebagai proyek yang merefleksikan nilai-nilai Barat daripada universalitas. Negara-negara pascakolonial sering menghadapi tantangan dalam menyeimbangkan sekularisme dengan kebutuhan masyarakat yang masih sangat religius (Hurd, 2009).

Feminisme agama dalam HI memandang agama sebagai sistem yang memperkuat hierarki patriarkal, membatasi hak-hak perempuan, dan mengeksklusi mereka dari ruang-ruang kekuasaan global. Interpretasi agama menjustifikasi ketidaksetaraan gender dalam hukum syariah atau peran perempuan di gereja Katolik (Wadud, 1999). Banyak bentuk kekerasan berbasis gender dan seksual dalam konflik agama, yang menunjukkan bahwa perang sering kali menciptakan kerentanan unik bagi perempuan dengan menjadikan kekerasan seksual sebagai senjata perang. Feminisme mendorong perempuan menjadi pemimpin atau agen perubahan dengan mengandalkan agama sebagai sumber kekuatan bagi menyediakan kerangka moral dan komunitas untuk resistensi dan perubahan.

Akhir kata, kami menghaturkan ucapan terima kasih tak terhingga atas kesediaan para mitra bestari dan para penulis dalam mewujudkan penerbitan e-Jurnal **INTERMESTIC: Journal of International Studies**, Volume 9 Nomor 1 pada November 2024 ini.

Hormat kami,

Arry Bainus dan Junita Budi Rachman

Pimpinan Redaksi dan Wakil Pimpinan Redaksi

Referensi

- Abiodun, D. W. (2023, September). Ethno- Religion Cum Geo-Political Background to the RussoUkraine War. *Lakhomi Journal: Scientific Journal of Culture*, 4(3).
- Abrams, M. H. (1971). *The Mirror and the Lamp: Romantic Theory and the Critical Tradition*. USA: Oxford University Press.
- Bergen, D. L. (2009). *War and Genocide: A Concise History of the Holocaust*. Lanham: Rowman & Littlefield Publishers.
- Berlin, I., Hardy, H., & Gray, J. (2013). *The Roots of Romanticism: Second Edition*. New Jersey: Princeton University Press.
- Beyer, P., & Beaman, L. (2007). *Peter Beyer and Lori Beaman, eds., Religion, Globalization*. Leiden: Brill.
- Bhargava, R. (1998). *Secularism and its Critics*. London: Oxford University Press.

- Brucy, A. (2018, August 13). *Articles*. Retrieved November 25, 2024, from CNRS News: <https://news.cnrs.fr/articles/on-the-sources-of-secularism-in-france>
- Campbell, P. R. (2006). *The origins of the French Revolution*. New York: Palgrave Macmillan.
- Cesari, J. (2011). Islamophobia in the West: A Comparison Between Europe and America. In J. L. Kalin, *Islamophobia: The Challenge of Pluralism in the 21st Century*. London: Oxford University Press.
- Cladis, M. (2015, September 21). Looking Back to See Forward: Romanticism, Religion and the Secular in Modernity. *e-International Relations*. Retrieved November 25, 2024, from <https://www.e-ir.info/2015/09/21/looking-back-to-see-forward-romanticism-religion-and-the-secular-in-modernity/>
- Cox, R. W. (1981). *Cox, R. W. Social Forces, States and World Orders: Beyond International Relations Theory (1981)*. .
- Davies, N. (1996). *The History of Europe*. London: Harper Perennial;The Bodley Head.
- Engell, J. (1981). *The Creative Imagination: Enlightenment to Romanticism*. Harvard University Press.
- Erin K, W. (2022). *Religion and World Politics, Connecting Theory with Practice*. London: Routledge.
- Esposito, J. L. (1990). *The Iranian Revolution: Its Global Impact*. New York: Westview Press.
- Esposito, J. L., Fasching, D. J., & Lewis, T. T. (2017). *World's Religion Today*. New York: Oxford University Press.
- Fanon, F. (1961). *The Wretched of the Earth*. Harmondsworth: Penguin.
- Fox, J. (2001). Religion as an Overlooked Element of International Relations. *International Studies Review*, 3(3), 53–73.
- Fox, J., & Sandler, S. (2004). *Religion in International Relations: The Return from Exile*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Gaddis, J. L. (1992). International Relations Theory and the End of the Cold War. *International Security*, 17(3).
- Haynes, J. (2007). *An Introduction to International Relations and Religion*. Harlow: Pearson.
- Haynes, J. (2008). *Religion and Politics in International Relations*. London: Routledge.
- Haynes, J. (2009). *Religion and Politics in Europe, the Middle East and North Africa*. New York: Religion and Politics in Europe, the Middle East and North Africa (Routledge .
- Haynes, J. (2017, July 27). Religion in Foreign Policy. *Oxford Research Encyclopedia of Politics*. doi:<https://doi.org/10.1093/acrefore/9780190228637.013.380>
- Haynes, J. (2021, March 25). Religion, Nationalism, and Transnational Actors. *International Studies*. doi:<https://doi.org/10.1093/acrefore/9780190846626.013.417>
- Herrmann, S. (2021). Major Muslim-Christian Dialogue Initiatives Since 9/11. *KATHA*, 17.
- Huntington, S. P. (2002). *The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order*. London: Free Press.,.
- Hurd, E. S. (2009). *The Politics of Secularism in International Relations*. Princeton : Princeton University Press.

- Kadri, H., & Abdelsalam, E. F. (2020). Geopolitics of Religion: How Does Religion Influence International Relations and States' Foreign Policies? *International Journal of World Policy and Development Studies*, 6(3).
- Keohane, R., & Nye, J. S. (1977). *Power and Interdependence*. Keohane, R. O., & Nye, J. S. Power and Interdependence (1977).
- Kepel, G. (2002). *Jihad: The Trail of Political Islam*. London: I.B. Tauris.
- Kley, D. V. (2006). The Religious Origins of the French Revolution, 1560–1791. In P. R. Campbell, *The origins of the French Revolution*. New York: Palgrave Macmillan.
- Kosal, U. (2024). Why Religion Matters: Social Scientific. *Granite Journal*, 9(1).
- Kristiono, M. J. (2017). Understanding the Body of Christ: a Review Article on Riman Catholic Church in International Relations. *Global: Jurnal Politik Internasional*, 19(1), 16-18. doi:10.7454/global.v19i1.133
- Kubalkova, V., Onuf, N., & Kowert, P. (1998). *International Relations in A Constructed World*. New York: Routledge.
- Kuhn, T. (1962). *The Structure of Scientific Revolution*. Chicago: The University of Chicago Press.
- Nye, J. S. (2021). Soft power: the evolution of a concept. *Journal of Political Power*. doi:DOI: 10.1080/2158379X.2021.1879572
- O'Beara, F. (2022). Russia's war on Ukraine: The religious dimension. *European Parliament*. European Parliamentary Research Service.
- Philpott, D. (2000). The Religious Roots of Modern International Relations. *World Politics*, 52(2), 206–245. doi:DOI: 10.1017/S0043887100002604
- Roy, O. (2004). *Globalized Islam: The Search for a New Ummah*. New York : Columbia University Press.
- Ryall, D. (2001). The Catholic Church as a Transnational Actor. In D. Josselin, & W. Wallace, *Non-State Actors in World Politics* (pp. 41-58). London: Palgrave Macmillan. doi:https://doi.org/10.1057/9781403900906_3
- Said, E. W. (1978). *Orientalism*. Santiago: Debolsillo.
- Schleiermacher, F. (1996). *On Religion: Speeches to Its Cultures Despisers*. Cambridge University Press.
- Shani, G. (2009). Transnational religious actors and international relations. In J. Haynes, *Religion and Politics* (pp. 308-323). Oxon: Routledge. Retrieved November 25, 2024, from https://www.academia.edu/2621974/Transnational_religious_actors_and_international_relations?auto=download
- Shuriye, A. O. (2011). 2001. *International Journal of Humanities and Social Science*, 3(1).
- Taylor, C. (2007). *A Secular Age*. London: The Belknap Press of Harvard University Press.
- Thomas, S. M. (2005). *The Global Resurgence of Religion and the Transformation of International Relations*. London: Palgrave Macmillan.
- Thomas, S. M. (2005). *The Global Resurgence of Religion and the Transformation of International Relations: The Struggle for the Soul of the Twenty-first Century*. London: Palgrave Macmillan.
- Toft, M. D., Philpott, D., & Shah, T. S. (2011). *The publisher of God's Century: Resurgent Religion and Global Politics*, W. W. Norton & Company, is based in New York City. New York City: W. W. Norton & Company.
- Troy, J. (2011). *Religion and the Realist Tradition*. London:: Routledge.

- Valuer, I. (1971). The Roman Catholic Church: A Transnational Actor. *International Organization*, 25(3), 479-502. doi:10.1017/S0020818300026278
- Wadud, A. (1999). *Qur'an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective*. Oxford: University Press.
- Wordsworth, W. (2000). *Lyrical Ballads*. Oxford University Press.